



**PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA SURABAYA
LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2023
Bagian Anggaran 005.01.0500.526767**

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Semabung, Gedangan

Sidoarjo - Jawa Timur 61254

Telp. 031-8683141

e-mail : ptunsby_keuangan@yahoo.com



**LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Semambung, Gedangan

Telp. 031-8683141

Sidoarjo - Jawa Timur 61254

e-mail : ptunsby_keuangan@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sidoarjo, 11 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



DJOKO PRIJONO, S.E.

NIP. 19710526 199103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
RINGKASAN.....	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	ix
NERACA.....	x
LAPORAN OPERASIONAL.....	xii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
A. PENJELASAN UMUM.....	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
A.4. Basis Akuntansi.....	4
A.5. Dasar Pengukuran.....	4
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	12
B.1. Pendapatan.....	12
B.2. Belanja Pegawai.....	15
B.3. Belanja Barang.....	16
B.4. Belanja Modal.....	17
B.4.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	17
B.4.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
B.4.3. Belanja Modal Jaringan.....	18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	19
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	19
C.2. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>).....	19

C.7 Persediaan	19
C.8 Tanah	20
C.9 Peralatan dan Mesin.....	23
C.10 Gedung dan Bangunan	23
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
C.12 Aset Lainnya	26
C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan	27
C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	27
C.17 Aset Tak Berwujud.....	28
C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	28
C.20 Utang kepada Pihak Ketiga	29
C.22 Uang Muka dari KPPN	29
C.23 Ekuitas	29
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	31
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	31
D.2 Beban Pegawai	31
D.3 Beban Persediaan	32
D.4 Beban Barang dan Jasa	32
D.5. Beban Pemeliharaan	33
D.6 Beban Perjalanan Dinas	34
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	34
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	35
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	36
E.1 Ekuitas Awal	36
E.2 Defisit LO	36
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	36
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	36
E.5 Koreksi Lain-lain	36
E.6 Transaksi Antar Entitas	36
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	37

E.6.2 Transfer masuk.....	37
E.7Ekuitas Akhir.....	37
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	38
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	38
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	38
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi Pendapatan dan Anggaran Awal TA. 2023.....	132
Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	13
Tabel 3. Perbandingan Realisasi PNBPN TA. 2023 dan TA. 2023.....	13
Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2023.....	14
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2023 dan TA. 2023.....	15
Tabel 6. Perbandingan Belanja Pegawai TA. 2023 dan TA. 2023.....	16
Tabel 7. Perbandingan Belanja Barang TA. 2023 dan TA. 2023.....	16
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal TA. 2023 dan TA. 2023.....	17
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2023.....	17
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2023 dan TA. 2023.....	18
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA. 2023 dan TA. 2023.....	18
Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2023.....	19
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.....	19
Tabel 14. Rincian Persediaan.....	20
Tabel 15. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2023.....	20
Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	27
Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	28
Tabel 18. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	29
Tabel 19. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.....	31
Tabel 20. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.....	32
Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.....	32
Tabel 22. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.....	33
Tabel 23. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.....	33
Tabel 24. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.....	34
Tabel 25. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.....	34
Tabel 26. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022.....	35
Tabel 27. Transaksi Antar Entitas.....	37
Tabel 28. Dipa Awal Tahun Anggaran 2023.....	39
Tabel 29-35. Revisi Dipa Tahun Anggaran 2023 Ke- 1.....	40
Lampiran A-1 Tabel Penyusutan Semester II Tahun Anggaran 2023.....	44

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 89 Gedangan
Telp. (031) 8683141, 8683114 Faximile : (031) 8683142
Website : www.ptun-surabaya.go.id, Email : ptunsby_keuangan@yahoo.com
SIDOARJO - 61254

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Semester I Tahun 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 11 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

A blue circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya is overlaid with a black ink signature. Below the signature, the name 'DJOKO PRIJONO, S.E.' and the NIP number 'NIP-19710526 199103 1 002' are printed.

DJOKO PRIJONO, S.E.

NIP-19710526 199103 1 002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.182.500,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 3.428.000,00 atau mencapai 34 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2023 adalah sebesar Rp. 6.145.150.737,00 atau mencapai 46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 13.434.841.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 68.841.615.592,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 60.092.500,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 68.385.127.752,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 396.395.340,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 711.700.075,00 dan Rp. 68.129.915.517,00. Sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 68.841.615.592,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 1.275.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 7.050.192.851,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 7.048.917.851,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. 7.048.917.851,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 69.017.496.381,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp. 7.048.917.851,00, kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp. 0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 6.161.336.987,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp. 68.129.915.517,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARANPENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

URAIAN	CATATAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	8.1	3.428.000,00	1.182.500,00	34,50	3.428.000,00	1.452.500,00	42,37
Jumlah Pendapatan		3.428.000,00	1.182.500,00	34,50	3.428.000,00	1.452.500,00	42,37
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	8.2	11.561.728.000,00	5.319.079.757,00	46,01	8.284.909.000,00	4.949.974.474,00	59,75
2. Belanja Barang	8.3	1.830.613.000,00	826.070.980,00	45,13	1.810.823.000,00	961.096.648,00	53,08
3. Belanja Modal	8.4	42.500.000,00	-	-	289.500.000,00	229.500.000,00	79,27
Jumlah Belanja		13.434.841.000,00	6.145.150.737,00	45,74	10.385.232.000,00	6.140.571.122,00	59,13

NERACA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
NERACA
30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2023	31 DESEMBER 2022
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	60.000.000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2	-	218.750
Piutang Bukan Pajak	C. 3	92.500	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		92.500	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	-
Persediaan	C. 7	-	-
Jumlah Aset Lancar		60.092.500	218.750
Aset Tetap			
Tanah	C. 8	60.866.720.873	60.866.720.873
Peralatan dan Mesin	C. 9	3.403.571.737	3.383.721.737
Gedung dan Bangunan	C. 10	8.614.102.755	8.614.102.755
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 11	132.750.000	132.750.000
Aset Tetap Lainnya	C. 12	190.000	190.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 13	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 14	(4.632.207.613)	(4.385.344.579)
Jumlah Aset Tetap		68.385.127.752	68.612.140.786
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 15	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 16	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 17	-	-
Aset Lain-Lain	C. 18	642.246.408	642.246.408
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 19	(245.851.068)	(236.033.013)
Jumlah Aset Lainnya		396.395.340	406.213.395
JUMLAH ASET		68.841.615.592	69.018.572.931
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 20	651.700.075	1.076.550
Utang yang belum ditagihkan	C. 21	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 22	60.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		711.700.075	1.076.550
JUMLAH KEWAJIBAN		711.700.075	1.076.550
EKUITAS			
Ekuitas	C. 23	68.129.915.517	69.017.496.381
JUMLAH EKUITAS		68.129.915.517	69.017.496.381

LAPORAN OPERASIONAL**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
LAPORAN OPERASIONAL
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022**

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		1.275.000	1.590.000
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	1.275.000	1.590.000
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	5.917.944.832	6.345.164.292
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	14.248.760	17.321.037
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	673.334.414	740.169.906
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	178.337.114	201.096.114
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	12.127.892	8.211.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	254.199.839	251.715.793
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		7.050.192.851	7.563.678.142
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.048.917.851)	(7.562.088.142)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(7.048.917.851)	(7.562.088.142)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITASPENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	69.017.496.381,00	11.473.175.699,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(7.048.917.851,00)	(7.562.088.142,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	6.161.336.987,00	6.139.118.622,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(887.580.864,00)	(1.422.969.520,00)
EKUITAS AKHIR	E. 7	68.129.915.517,00	10.050.206.179,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- ~~6~~2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- ~~4~~3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- ~~2~~4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- ~~3~~5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- ~~4~~6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- ~~5~~8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- ~~6~~9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- ~~7~~10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- ~~8~~11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- ~~9~~12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,44 cm + Indent at: 1,44 cm, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Tab stops: Not at 15,9 cm

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,44 cm + Indent at: 1,44 cm, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border), Tab stops: Not at 15,9 cm

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

- 10-13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMK.06/2014;
- 11-14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 12-15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 13-16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- 17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Tata Usaha
Negara
Surabaya

~~RENCANA STRATEGIS <KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGANAMA SATKER>~~

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Tahun 2023 merupakan bagian dari Cetak Biru (Blueprint) yang dirancang untuk jangka waktu yang panjang yaitu 25 tahun kedepan yang diharapkan untuk menjadi langkah besar untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan kita.

Dengan adanya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 ini, Mahkamah Agung berharap proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran.

Selain itu Mahkamah Agung berharap agar pembaruan yang tengah dan terus akan dilakukan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama

Formatted: None, Indent: Left: 0,63 cm, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Tab after: 1,44 cm + Indent at: 1,44 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together

Formatted: Font: Calibri, 11 pt, Font color: Auto, English (United Kingdom)

Formatted: Font: Calibri, 11 pt, Not Bold, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: Calibri, English (United States), Highlight

Formatted: Heading 4, Left, Indent: Left: 0 cm, Widow/Orphan control

Formatted: Font: Calibri, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, 9 pt, Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

stakeholders lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.

Dan sejak beberapa tahun ini pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Berikut Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG DAN MODERN”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Yang Modern Dan Wibawa”.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah :

1. Melaksanakan Hukum yang berkeadilan.
2. Melaksanakan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi yang berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan tertib administrasi perkara dan administrasi umum berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peradilan yang modern.
4. Menciptakan aparaturnya yang berintegritas dan bertanggung jawab.
5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

[Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan](#)

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Formatted: Font: Calibri, 11 pt, Not Bold, Font color: Auto, English (United States)

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Pendapatan PENDAPATAN <KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGANAMA SATKER>
(((Diisi dengan nilai realisasi pendapatan dan diuraikan per jenis pendapatan: pendapatan pajak (khusus Departemen Kementerian Keuangan), pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah. Nilai realisasi pendapatan dibandingkan dengan nilai realisasi pendapatan periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Uraikan juga penyebab kenaikan/penurunan realisasi pendapatan tersebut)))

Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt, Not Bold, No underline, German (Luxembourg)

Formatted: Font: Calibri, 11 pt, Not Bold, No underline, Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, 11 pt, Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Widow/Orphan control

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Formatted: Font: (Default) Calibri, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

M – Menyampaikan Laporan BarangTM – Tidak menyampaikan Laporan Barang**Formatted:** Font: Calibri, 11 pt, Not Superscript/ Subscript**Formatted:** Font: Calibri, 11 pt, Not Superscript/ SubscriptA.4. KEBHAKAN AKUNTANSI *)KebijakanAkuntansi**Formatted:** Font: Calibri, 11 pt, Font color: Auto, Not Superscript/ Subscript**Formatted:** Font: Calibri, 11 pt, Font color: Auto, Not Superscript/ Subscript*Basis Akrual*A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Formatted: Heading 4, Left, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, Widow/Orphan control, Font Alignment: Auto, Border: Bottom: (No border)*Dasar Pengukuran*A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt, Bold, English (United Kingdom), Not Superscript/ Subscript**Formatted:** Font: (Default) Arial, Finnish

Kebijakan
akuntansi**A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang merupakan entitas pelaporan dari Mahkamah Agung RI. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian Negara/Lembaga Nama Satker >

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt, Bold, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt

Formatted: Font: Calibri, 11 pt, Not Bold, Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font: Calibri, Bold, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Font: Calibri, Bold, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Calibri, Bold, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan	10%

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
SEMESTER I TAHUN 2023

	pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp. 1.000.000** (satu juta rupiah) berdasarkan **PMK Nomor 181/PMK.06/2016**;
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan **PMK Nomor 181/PMK.06/2016**;
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
---------------------	--------------

Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban*

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Investasi²⁴²⁾

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerahda, dan

²⁴²⁾ jika terdapat transaksi investasi pada komontorian negara/lombaga yang bersangkutan

²⁴³⁾ jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lombaga yang bersangkutan

Formatted: Font: Calibri, 11 pt, Font color: Auto, (Asian) Japanese, (Other) Indonesian, Not Superscript/

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: 3,75 cm, Space After: 0 pt, Tab stops: Not at 7,62 cm + 15,24 cm

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: 3,75 cm, Space After: 0 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Calibri, English (United States)

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: 3,75 cm, First line: 0 cm, Space After: 0 pt

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: English (United States)

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.

Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non-BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: 3,75 cm, Space After: 0 pt

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: 3,75 cm, Space After: 0 pt, No bullets or numbering

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: 3,75 cm, Space After: 0 pt

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: 3,75 cm, First line: 0 cm, Space After: 0 pt

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Indent: Left: 3,75 cm, Space After: 0 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non-earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: Calibri, Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Calibri, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan 1 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini disebabkan oleh adanya :

1. Pergeseran antar akun untuk memudahkan melaksanakan anggaran
2. Perubahan rencana penarikan dana Halaman III Dipa;

Tabel 1. Rincian Estimasi Pendapatan dan Anggaran Awal Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023	
	Estimasi Pendapatan / Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	3.428.000	3.428.000
Jumlah Pendapatan	3.428.000	3.428.000
Belanja		
Belanja Pegawai	11.561.728.000	11.561.728.000
Belanja Barang	1.830.613.000	1.830.613.000
Belanja Modal	42.500.000	42.500.000
Jumlah Belanja	13.434.841.000	13.434.841.000

Realisasi**Pendapatan**

Rp.1.182.500,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 1.182.500,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.428.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut :

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2023		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.428.000,00	1.182.500,00	34,50
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		3.428.000,00	1.182.500,00	34,50
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		3.428.000,00	1.182.500,00	34,50

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 270.000,00 atau 18,59 persen dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan sewa tanah, gedung sebesar Rp. 270.000,00.

Perbandingan realisasi PNPB TA. 2023 dan TA. 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. Perbandingan Realisasi PNPB TA. 2023 dan TA. 2022

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA. 2023	TA. 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.182.500,00	1.452.500,00	(270.000,00)	(18,59)
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Netto		1.182.500,00	1.452.500,00	(270.000,00)	(18,59)

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Belanja

Realisasi
Belanja
Negara Rp.
6.145.150.737,00

Realisasi Belanja Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 6.145.150.737,00 atau 45,74 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 13.434.841.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2023 tersaji sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2023

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	11.561.728.000,00	5.319.079.757,00	46,01
52	Belanja Barang	1.830.613.000,00	826.070.980,00	45,13
53	Belanja Modal	42.500.000,00	-	0,00
Jumlah Belanja Bruto		13.434.841.000,00	6.145.150.737,00	45,74
Pengembalian Belanja		-	-	0,00
Jumlah Belanja Netto		13.434.841.000,00	6.145.150.737,00	45,74

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Realisasi belanja periode 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.579.615,00 atau sebesar 0,07 % dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2022.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan belanja pada jenis belanja pegawai.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2023 dan TA. 2022

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA. 2023	TA. 2022	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	5.319.079.757,00	4.949.974.474,00	369.105.283,00	7,46
52	Belanja Barang	826.070.980,00	961.096.648,00	(135.025.668,00)	(14,05)
53	Belanja Modal	-	229.500.000,00	(229.500.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Netto		6.145.150.737,00	6.140.571.122,00	4.579.615,00	0,07

B.2 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp.
5.319.079.757,00

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.319.079.757,00 dan Rp. 4.949.974.474,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 369.105.283,00 atau 7,46 % dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan adanya hakim baru pada posisi Wakil Ketua di tahun 2023 sehingga berpengaruh pada realisasi belanja pegawai pada 30 Juni tahun 2023.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini :

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Tabel 6. Perbandingan Belanja Pegawai TA. 2023 dan TA. 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2023	TA. 2022	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.747.108.980,00	1.636.518.520,00	110.590.460,00	6,76
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.230,00	17.843,00	1.387,00	7,77
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	116.380.310,00	109.643.610,00	6.736.700,00	6,14
Belanja Tunj. Anak PNS	37.326.082,00	35.416.444,00	1.909.638,00	5,39
Belanja Tunj. Struktural PNS	18.720.000,00	20.160.000,00	(1.440.000,00)	(7,14)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.746.160.000,00	2.542.020.000,00	204.140.000,00	8,03
Belanja Tunj. PPh PNS	364.423.888,00	311.702.314,00	52.721.574,00	16,91
Belanja Tunj. Beras PNS	87.483.360,00	83.138.160,00	4.345.200,00	5,23
Belanja Uang Makan PNS	193.358.000,00	203.808.000,00	(10.450.000,00)	(5,13)
Belanja Tunjangan Umum PNS	8.285.000,00	7.550.000,00	735.000,00	9,74
Realisasi Belanja Bruto	5.319.264.850,00	4.949.974.891,00	369.289.959,00	7,46
Pengembalian	(185.093,00)	(417,00)	(184.676,00)	44.286,81
Realisasi Belanja Netto	5.319.079.757,00	4.949.974.474,00	369.105.283,00	7,46

B.3 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp. 826.070.980,00

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 826.070.980,00 dan Rp. 961.096.648,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp. 135.025.668,00 atau 14,05 % dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2022.

Hal ini disebabkan adanya penurunan pada semua jenis belanja barang kecuali belanja barang perjalanan dinas yang mengalami kenaikan. Penurunan paling signifikan terutama pada belanja jasa.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Perbandingan Belanja Barang TA. 2023 dan TA. 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2023	TA. 2022	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	354.261.498,00	370.512.894,00	(16.251.396,00)	(4,39)
Belanja Barang Non Operasional	3.697.000,00	14.965.000,00	(11.268.000,00)	-
Belanja Barang Persediaan	18.893.420,00	20.106.487,00	(1.213.067,00)	100,00
Belanja Jasa	263.398.716,00	354.392.012,00	(90.993.296,00)	(25,68)
Belanja Pemeliharaan	173.692.454,00	192.909.255,00	(19.216.801,00)	(9,96)
Belanja Perjalanan Dinas	12.127.892,00	8.211.000,00	3.916.892,00	47,70
Realisasi Belanja Bruto	826.070.980,00	961.096.648,00	(135.025.668,00)	(14,05)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	826.070.980,00	961.096.648,00	(135.025.668,00)	(14,05)

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Belanja

Modal Rp.0,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 229.500.000,00. Hal ini disebabkan karena belum dilaksanakan pada Semester 1 Tahun Anggaran 2023.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal TA. 2023 dan TA. 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2023	TA. 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	229.500.000,00	(229.500.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	229.500.000,00	(229.500.000,00)	(100,00)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	229.500.000,00	(229.500.000,00)	(100,00)

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 229.500.000,00. Hal ini disebabkan karena belum dilaksanakan pada Semester 1 Tahun Anggaran 2023.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2023	TA. 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	229.500.000,00	(229.500.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola TI	-	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	229.500.000,00	(229.500.000,00)	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	229.500.000,00	(229.500.000,00)	-

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Hal ini disebabkan karena belum dilaksanakan pada Semester 1 Tahun Anggaran 2023.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2023 dan TA. 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2023	TA. 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Hal ini disebabkan karena tidak ada Pagu Belanja Modal Jaringan pada tahun anggaran tersebut;

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA. 2023 dan TA. 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA. 2023	TA. 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 60.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,00 dan Rp. 0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
1.	Uang Persediaan	60.000.000,00	0,00
	Jumlah	60.000.000,00	0,00

C.2. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp. 0,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 218.750,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2023	31 Desember 2022
	Belanja Dibayar Dimuka	-	218.750,00
JUMLAH		-	218.750,00

C.7. Persediaan

Persediaan
Rp. 0,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	Mutasi	30 Juni 2023
1	Barang Konsumsi	-	-	-
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-	-

C.8. Tanah

Tanah

Rp.

60.866.720.873,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 60.866.720.873,00 dan Rp. 60.866.720.873,00 .

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	60.866.720.873,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2023	60.866.720.873,00

Tabel 15. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2023

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m ²)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Medaeng, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo	Gedung Kantor PTUN Surabaya yg lama, Jl. Letjend Sutoyo No. 266 Medaeng Waru Sidoarjo	Pemerintah RI. CQ. Mahkamah Agung RI.	2.160	3.240.115.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Sertifikat Hak Pakai Nomor 00051 Desa Semambung, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo	Gedung Kantor PTUN Surabaya yg baru, Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89 Semambung, Gedangan, Sidoarjo	Pemerintah RI. CQ. Mahkamah Agung RI.	4.391	57.626.605.873,00
Jumlah Halaman I					6.551	60.866.720.873,00

Ringkasan / Kronologis perubahan Nilai Perolehan Aset Tanah :

1. Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah sejak Periode Pelaporan per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 115.000 dari Tahun Anggaran 2015 yang berasal dari Belanja Modal Balik Nama Sertipikat Tanah dari atas nama Departemen Kehakiman menjadi atas nama Pemerintah R.I. CQ. Mahkamah Agung R.I. melalui SPM dengan No. SPM 00061 tanggal 08 September 2016 dengan No. SP2D 161651301007353 tanggal 09 September 2016.
Berdasarkan PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa penyusutan tersebut tidak berlaku pada aset-aset dibawah ini :
 1. Aset Tanah
 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Maka berdasarkan PMK tersebut diatas Nilai Aset Tanah tidak mengalami Akumulasi Penyusutan sehingga nilai tanah tersebut tetap dan tidak mengalami perubahan nilai yaitu sebesar Rp.3.240.115.000. Aset tanah sebesar Rp.3.240.115.000,- tersebut merupakan aset tanah yang berada di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang diatasnya berdiri Bangunan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang lama.

Dengan Kondisi bahwa sertipikat tanah tersebut per 31 Desember 2016 telah di Balik Nama dari atas nama Departemen Kehakiman menjadi Pemerintah R.I. CQ. Mahkamah Agung R.I. Dan pada Bulan Juli Tahun 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah berpindah ke Gedung yang baru yang berlokasi di Jl Raya Ir. H. Juanda No. 89 Semambung Gedangan Sidoarjo, dengan luas tanah sebesar 11.000 M2, saat ini telah berdiri 3 (tiga) Gedung Bangunan Pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Sertipikat Tanah 3 (tiga) Gedung Baru tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung R.I. dan untuk pencatatan Aset Tanah 3 (tiga) Gedung Baru tersebut saat ini masih dicatat pada Aplikasi Simak BMN Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. Sehingga tidak dicantumkan pada Aset Tanah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

2. Kemudian per Tahun Anggaran 2017 tidak ada perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 tetap senilai Rp. 3.240.115.000,- :
3. Setelah itu per Tahun Anggaran 2018 juga tidak ada perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 tetap senilai Rp. 3.240.115.000,- :
4. Selanjutnya per Tahun Anggaran 2019 ini juga tidak ada perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 tetap senilai Rp. 3.240.115.000,- :
5. Selanjutnya per Tahun Anggaran 2020 ini juga tidak ada perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 tetap senilai Rp. 3.240.115.000,- :
6. Selanjutnya per Tahun Anggaran 2021 ini juga tidak ada perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 tetap senilai Rp. 3.240.115.000,- :
7. Kemudian per Tahun Anggaran 2022 ini telah terbit Sertipikat Tanah Hak Pakai No. 00051 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang baru yang berlokasi di Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan telah resmi menjadi BMN Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nilai perolehan Rp. 57.626.605.873,00.
8. Sehingga total nilai tanah pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp. 60.866.720.873,00.
9. Selanjutnya per 30 Juni 2023 ini tidak ada perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tanah per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 tetap senilai Rp. 60.866.720.873,00.

C.9. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp.
3.403.571.737,
00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 3.403.571.737,00 dan Rp. 3.383.721.737,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 19.850.000,00.

Hal ini disebabkan adanya transfer masuk Mesin Scanner dari Mahkamah Agung sampai dengan 30 Juni 2023.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	3.383.721.737
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Transfer Masuk	19.850.000
Jumlah Mutasi Tambah	19.850.000
Transfer Keluar	-
Penghapusan	-
Tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	19.850.000
Saldo per 30 Juni 2023	3.403.571.737
Akumulasi Penyusutan	(3.022.088.907)
Nilai Buku	381.482.830

- Mutasi Tambah : Perolehan dari Transfer Masuk berupa 1 Unit Mesin Scanner dari Mahkamah Agung dengan Nilai Rp. 19.850.000,00;

Gedung dan
Bangunan
Rp.
8.614.102.755,00

C.10. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 8.614.102.755,00 dan Rp. 8.614.102.755,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	8.614.102.755,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2023	8.614.102.755,00
Akumulasi Penyusutan	(1.556.727.044,00)
Nilai Buku	7.057.375.711,00

Ringkasan / Kronologis perubahan Nilai Perolehan :

- Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan dikarenakan adanya Inventarisasi dan Penilaian dari KPKNL Sidoarjo per Bulan Oktober Tahun 2017 dengan Koreksi Nilai Sebesar (Rp. 348.140.605) sehingga Nilai Gedung dan Bangunan pada Tahun 2017 senilai Rp. 9.600.942.605 menjadi senilai Rp. 9.252.802.000.
- Kemudian per Tahun Anggaran 2018 tidak ada perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 tetap senilai Rp. 9.252.802.000,- :
- Selanjutnya per Tahun Anggaran 2019 juga tidak ada perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 tetap senilai Rp. 9.252.802.000, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 2 (dua) Unit Gedung dan Bangunan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya baik yang berada di Gedung Lama di Jl. Letjen Sutoyo No. 266 Medaeng Waru Sidoarjo maupun di Gedung Baru di Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89 Semambung Gedangan Sidoarjo, total nilai gedung keduanya sebesar Rp. 7.840.214.000.
 2. 1 (satu) Unit Bangunan Musholla yang berada di lokasi yang lama di Jl. Letjen Sutoyo No. 266 Medaeng Waru Sidoarjo dengan nilai sebesar Rp. 89.739.000.
 3. 2 (dua) Unit Rumah Dinas Golongan I Tipe B Permanen yang berlokasi di Jl. Siwalankerto Surabaya dengan nilai sebesar Rp. 350.198.000.
 4. 9 (sembilan) Unit Rumah Dinas Golongan I Tipe C Permanen dengan rincian 8 (delapan) Unit berlokasi di Kompleks Medaeng Waru Sidoarjo dan 1 (satu) unit berlokasi Jl. Siwalankerto Surabaya dengan nilai total sebesar Rp. 890.899.000.
 5. 1 (satu) Unit Rumah Dinas Golongan I Tipe E Permanen yang berlokasi di Jl. Siwalankerto Surabaya dengan nilai sebesar Rp. 63.834.000

6. Reklas Masuk berupa Pagar Permanen dari Reklas Keluar Irigasi sebesar Rp. 88.342.200. yang berlokasi di di Gedung Lama di Jl. Letjen Sutoyo No. 266 Medaeng Waru Sidoarjo yang telah disusutkan dengan nilai akhir sebesar Rp. 17.918.000

Ke 12 (dua belas) Rumah Dinas tersebut sampai saat ini Sertipikat Tanahnya masih dipegang dan atas nama Departemen Kehakiman.

Para Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah berkali-kali berusaha untuk mengajukan balik nama sertipikat tersebut namun sampai saat ini terkendala dengan aturan pada Departemen Kehakiman yang belum memungkinkan untuk hal itu.

- Pada periode 31 Desember 2020 telah terjadi Mutasi Tambah sebesar Rp. 10.714.000,- dan Mutasi Kurang sebesar Rp. 204.849.000,- sehingga menjadi Rp. 9.058.667.000,- Hal ini disebabkan karena adanya Koreksi Revaluasi BMN di Tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Mutasi Tambah pada Akun Pagar dengan Nilai Rp. 10.714.000,-
 2. Mutasi Kurang pada Bangunan Gedung Kantor dengan Nilai Rp. 36.341.000,-
 3. Mutasi Kurang pada Bangunan Gedung Tempat Ibadah dengan Nilai Rp. 50.743.000,-
 4. Mutasi Kurang pada Rumah Negara Golongan I dengan Nilai Rp. 117.765.000.000,-
 - Pada periode 31 Desember 2021 telah terjadi Mutasi sebesar Rp. 514.212.000,- sehingga menjadi Rp. 8.544.455.000,-
 - Pada periode 31 Desember 2022 telah terjadi beberapa mutasi sebagai berikut :
 1. Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan Tahun Anggaran 2022 berupa Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp. 29.992.755.000,- yang telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS Nomor : 00081A tanggal 31 Agustus 2022, dengan Nomor SP2D 221651301007536 tanggal 01 September 2022
 2. Berdasarkan temuan Tim BPK RI terhadap Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 39.655.000,- yang melebihi nilai kapitalisasi direkomendasikan untuk diakui sebagai penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dan telah ditindaklanjuti sebagai mutasi tambah.
- Sehingga nilai Gedung dan Bangunan menjadi Rp. 8.614.102.755,-
- Selanjutnya per 30 Juni 2023 ini tidak ada perubahan sehingga Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 tetap senilai Rp. 8.614.102.755,-.

C.11. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp.
132.750.000,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 132.750.000,00 dan Rp. 132.750.000,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	132.750.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2023	132.750.000,00
Akumulasi Penyusutan	(53.391.662,00)
Nilai Buku	79.358.338,00

C.12. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp.
642.246.408,00

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 642.246.408,00 dan Rp. 642.246.408,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	642.246.408,00
Pembelian	-
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	-
Aset Lain-lain	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2022	642.246.408,00
Akumulasi Penyusutan	(245.851.068,00)
Nilai Buku	396.395.340,00

C.13. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

Pengerjaan masing-masing Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Rp. 0,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah :

Saldo per 31 Desember 2022	-
Perolehan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2023	-

C.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. 4.632.207.613,00 dan Rp. 4.385.344.579,00.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp.
4.632.207.613,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.403.571.737	(3.022.088.907)	381.482.830
2	Gedung dan Bangunan	8.614.102.755	(1.556.727.044)	7.057.375.711
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	132.750.000	(53.391.662)	79.358.338
4	Aset Tetap Lainnya	190.000	-	190.000
Jumlah		12.150.614.492	(4.632.207.613)	7.518.406.879

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Font color: Auto

Aset Tak
Berwujud
Rp. 0,00

C.17. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.19. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.
245.851.068,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. 245.851.068,00 dan Rp. 236.033.013,00.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	52.300.000,00	52.300.000,00	-
2	Alat Kantor	2.675.000,00	2.675.000,00	-
3	Alat Studio	759.000,00	759.000,00	-
4	Komputer Unit	72.300.408,00	72.300.408,00	-
5	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	514.212.000,00	117.816.660,00	396.395.340,00
Jumlah		642.246.408,00	245.851.068,00	396.395.340,00

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-Lain	642.246.408,00	(245.851.068,00)	396.395.340,00
Jumlah		642.246.408,00	(245.851.068,00)	396.395.340,00

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp. 651.700.075,00

C.20. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 651.700.075,00 dan Rp. 1.076.550,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 18. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Gaji Pegawai	598.865.075	Gaji Induk Pegawai Bulan Juli 2023
2	Belanja Keperluan Perkantoran	35.335.000	Honorarium Pramubakti, Satpam dan Pengemudi sudah dibayar/SPM di bulan Juni 2023 tetapi SP2D di bulan Juli 2023
3	Belanja Keperluan Perkantoran	17.500.000	Tagihan internet bulan Juni 2023 sudah dibayar/SPM di bulan Juni 2023 tetapi SP2D di bulan Juli 2023
		651.700.075,00	

C.22. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,00 dan Rp. 0,00.

Uang muka dari KPPN Rp. 60.000.000,00

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp.
68.129.915.517,00

C.23. Ekuitas

Ekuitas per per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 68.129.915.517,00 dan Rp. 69.017.496.381,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp. 1.275.000,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.275.000,00 dan Rp. 1.590.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 19. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	1.275.000,00	1.590.000,00	(19,81)
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		1.275.000,00	1.590.000,00	(19,81)
Pendapatan Lain-Lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	0,00	0,00	-
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	-
Total		1.275.000,00	1.590.000,00	(19,81)

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari sewa gedung dan bangunan pada Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Sewa Tanah untuk Koperasi Pegawai KPRI PTUN Surabaya.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.5.917.944.832,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.917.944.832,00 dan Rp. 6.345.164.292,00 . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Font color: Auto

Tabel 20. Perbandingan Rincian Beban Pegawai
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.964.400.780,00	2.111.437.400,00	(6,96)
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	21.565,00	22.615,00	(4,64)
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	130.720.280,00	141.357.810,00	(7,53)
4	Beban Tunj. Anak PNS	41.912.580,00	45.620.816,00	(8,13)
5	Beban Tunj. Struktural PNS	21.060.000,00	25.920.000,00	(18,75)
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	3.061.760.000,00	3.271.740.000,00	(6,42)
7	Beban Tunj. PPh PNS	397.417.687,00	428.018.471,00	(7,15)
8	Beban Tunj. Beras PNS	98.273.940,00	107.109.180,00	(8,25)
9	Beban Uang Makan PNS	193.358.000,00	203.808.000,00	(5,13)
10	Beban Tunjangan Umum PNS	9.020.000,00	10.130.000,00	(10,96)
	Total	5.917.944.832,00	6.345.164.292,00	(6,73)

D.3. Beban PersediaanBeban Persediaan
Rp.14.248.760,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.248.760,00 dan Rp. 17.321.037,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Persediaan
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	14.248.760,00	17.321.037,00	(17,74)
2	Beban Persediaan Lainnya	0,00	0,00	-
	Total	14.248.760,00	17.321.037,00	(17,74)

D.4. Beban Barang dan JasaBeban Barang dan
Jasa
Rp.673.334.414,00

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 673.334.414,00 dan Rp. 740.169.906,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	370.447.248,00	319.387.521,00	15,99
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.518.000,00	2.190.500,00	14,95
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	34.003.000,00	21.150.000,00	60,77
4	Beban Barang Operasional Lainnya	347.000,00	26.470.573,00	(98,69)
5	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.697.000,00	0,00	-
6	Beban Barang Operasional - Penanganan Covid-19	0,00	1.614.300,00	-
7	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	14.965.000,00	-
8	Beban Langganan Listrik	1.249.548,00	90.935.365,00	(98,63)
9	Beban Langganan Telepon	659.318,00	1.569.547,00	(57,99)
10	Beban Langganan Air	7.779.500,00	4.037.100,00	92,70
11	Beban Sewa	252.633.800,00	253.470.000,00	(0,33)
12	Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	0,00	4.380.000,00	-
Total		673.334.414,00	740.169.906,00	(9,03)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp. 178.337.114,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 178.337.114,00 dan Rp. 201.096.114,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	82.335.598,00	97.503.750,00	(15,56)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	24.415.513,00	14.833.350,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.941.343,00	80.572.155,00	(16,92)
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	4.644.660,00	8.186.859,00	(43,27)
Total		178.337.114,00	201.096.114,00	(11,32)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.12.127.892,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.127.892,00 dan Rp. 8.211.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	10.777.892,00	7.311.000,00	47,42
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.350.000,00	900.000,00	50,00
Total		12.127.892,00	8.211.000,00	47,70

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 254.199.839,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 254.199.839,00 dan Rp. 251.715.793,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	112.346.258,00	110.593.173,00	1,59
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	129.977.193,00	129.246.232,00	0,57
3	Beban Penyusutan Jaringan	2.058.333,00	2.058.333,00	-
4	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional pemerintah	9.818.055,00	9.818.055,00	-
Total		254.199.839,00	251.715.793,00	0,99

0

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional*Surplus dari
Kegiatan Non**Operasional Rp.0,00*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-
2	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
3	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Total		-	-	-

Ekuitas Awal

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rp.

69.017.496.381,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 69.017.496.381,00 dan Rp. 11.473.175.699,00.

Defisit LO

E.2. Defisit LO

Rp.

7.048.917.851,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah defisit sebesar Rp. 7.048.917.851,00 dan Rp. 7.562.088.142,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap

Rp. 0,00

E.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Koreksi Nilai Aset

Tetap Non

Revaluasi

Rp. 0,00

E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Koreksi lain-lain

Rp. 0,00

E.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Transaksi Antar

Entitas

Rp.

6.161.336.987,00

E.6. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.161.336.987,00 dan Rp. 6.139.118.622,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 27. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.145.150.737,00
Diterima dari Entitas Lain	(1.182.500,00)
Transfer Masuk	17.368.750,00
Pengesahan Hibah Langsung	-
	6.161.336.987,00

DDEL / DKEL

Rp. 1.182.500,00/
Rp.
6.145.150.737,00

E.6.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp. 1.182.500,00 sedangkan DKEL sebesar Rp. 6.145.150.737,00.

Transfer Masuk
Rp. 0,00

E.6.2. Transfer masuk

Transfer Masuk merupakan penerimaan aset dari hasil kiriman (satker lainnya) dalam lingkup Pemerintah Pusat sebesar Rp. 0,00

Ekuitas Akhir
Rp.
68.129.915.517,00

E.7. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 68.129.915.517,00 dan Rp. 10.050.206.179,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2023.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2022

Terdapat temuan Tim Pemeriksaan BPK RI pada Tahun Anggaran 2022 diantaranya sebagai berikut:

- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 berupa pekerjaan perbaikan Gedung kantor senilai Rp. 39.655.000,- yang melebihi nilai kapitalisasi direkomendasikan untuk diakui sebagai penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan
- Transfer masuk Peralatan dan Mesin berupa Scanner dari BUA MARI senilai Rp. 19.850.000,- secara aplikasi sudah diterima di tahun 2022 tetapi secara fisik barang baru diterima di bulan Januari 2023 sehingga direkomendasikan untuk melakukan Transfer Keluar.
- Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung berupa pembelian gordyn senilai Rp. 994.500,- seharusnya dimasukkan sebagai ekstrakomptabel
- Terdapat Belanja Pemeliharaan PC berupa pembelian web cam senilai Rp. 330.000 seharusnya dimasukkan sebagai ekstrakomptabel

Terhadap temuan-temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain**F.3.1. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah:

1. REKENING VIRTUAL pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Gedung BRI 1 Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav 44- 46, Jakarta 10210 dengan Nomor Rekening : 653245267671000 a.n. BPG 165 PTUN SURABAYA QQ 526767 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 33.609.347,-.

- Rekening tersebut sebagai pengganti rekening yang lama pada BRI CABANG SURABAYA JEMURSARI A/C 0412-01-000333-30-5 a.n. BPG 165 PTUN SURABAYA QQ 526767 yang digunakan sebagai Penampung DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 38

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Font color: Auto

sebelumnya dengan Surat Penutupan Rekening Nomor : B.1117-IX/KC/OPS/05/2021 tanggal 03 Mei 2021.

F.3.2. REVISI DIPA 01

1. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tahun Anggaran 2023 dengan nomor : SP DIPA-005-01-2-526767/2023 tanggal 30 November Tahun 2022 berjumlah sebesar Rp. 13.434.841.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28. Dipa Awal Tahun Anggaran 2023

a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	No.	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.WA			
1066.EBA.962.051.A	1.	521252	4.446.000
1066.EBA.962.051.B	2.	521252	1.000.000
1066.EBA.994.001.A	1.	511111	3.764.536.000
	2.	511119	50.000
	3.	511121	255.476.000
	4.	511122	80.731.000
	5.	511123	46.080.000
	6.	511124	5.828.080.000
	7.	511125	767.760.000
	8.	511126	167.000.000
	9.	511129	591.360.000
	10.	511151	60.655.000
1066.EBA.994.002.A	1.	521111	508.305.000
	2.	521811	46.500.000
1066.EBA.994.002.B	1.	521111	218.877.000
	2.	521114	5.400.000
	3.	522112	6.000.000
	4.	522113	12.000.000
	5.	522141	6.000.000
1066.EBA.994.002.C	1.	523111	142.775.000
	2.	523119	24.416.000
	3.	523121	151.881.000
1066.EBA.994.002.D	1.	521111	29.225.000
	2.	521115	84.084.000
1066.EBA.994.002.E	1.	521119	11.250.000

1066.EBA.994.002.F	1.	524111	49.974.000
1066.EBA.994.002.G	1.	524111	7.380.000
	2.	524113	2.700.000
1066.EBA.994.002.H	1.	522141	518.400.000
1071.EBB.951.052.A	1.	532111	10.000.000
1071.EBB.951.053.A	1.	532111	3.000.000
1071.EBB.971.051.A	1.	533121	29.500.000
		Total	13.434.841.000,00

b. Revisi DIPA Ke-1 (Tanggal 17 April 2023)

Tidak terdapat perubahan (penambahan) nilai pagu pada Revisi DIPA 1. Revisi dilakukan karena adanya perubahan rencana penarikan dana halaman III DIPA

Tabel 29. Revisi Dipa Ke-1 TA. 2023

Program dan Kegiatan	No.	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.WA			
1066.EBA.962.051.A	1.	521252	4.446.000
1066.EBA.962.051.B	2.	521252	1.000.000
1066.EBA.994.001.A	1.	511111	3.764.536.000
	2.	511119	50.000
	3.	511121	255.476.000
	4.	511122	80.731.000
	5.	511123	46.080.000
	6.	511124	5.828.080.000
	7.	511125	767.760.000
	8.	511126	167.000.000
	9.	511129	591.360.000
	10.	511151	60.655.000
1066.EBA.994.002.A	1.	521111	504.429.000
	2.	521811	45.300.000
1066.EBA.994.002.B	1.	521111	218.128.000
	2.	521114	6.756.000
	3.	522111	1.251.000
	4.	522112	6.000.000
	5.	522113	14.208.000
	6.	522141	7.169.000
1066.EBA.994.002.C	1.	523111	145.607.000
	2.	523119	24.416.000
	3.	523121	151.890.000
1066.EBA.994.002.D	1.	521111	26.225.000
	2.	521115	84.084.000

1066.EBA.994.002.E	1.	521119	11.250.000
1066.EBA.994.002.F	1.	524111	49.974.000
1066.EBA.994.002.G	1.	524111	7.380.000
	2.	524113	2.700.000
1066.EBA.994.002.H	1.	522141	518.400.000
1071.EBB.951.052.A	1.	532111	10.000.000
1071.EBB.951.053.A	1.	532111	3.000.000
1071.EBB.971.051.A	1.	533121	29.500.000
Total			13.434.841.000,00

Program dan Kegiatan	No.	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.WA				
1066.EBA.962.051.A	1.	521252	4.446.000	4.446.000
1066.EBA.962.051.B	2.	521252	1.000.000	1.000.000
1066.EBA.994.001.A	1.	511111	3.764.536.000	3.764.536.000
	2.	511119	50.000	50.000
	3.	511121	255.476.000	255.476.000
	4.	511122	80.731.000	80.731.000
	5.	511123	46.080.000	46.080.000
	6.	511124	5.828.080.000	5.828.080.000
	7.	511125	767.760.000	767.760.000
	8.	511126	167.000.000	167.000.000
	9.	511129	591.360.000	591.360.000
	10.	511151	60.655.000	60.655.000
1066.EBA.994.002.A	1.	521111	508.305.000	504.429.000
	2.	521811	46.500.000	45.300.000
1066.EBA.994.002.B	1.	521111	218.877.000	218.128.000
	2.	521114	5.400.000	6.756.000
	3.	522112	6.000.000	1.251.000
	4.	522113	12.000.000	6.000.000
	5.	522141	6.000.000	14.208.000
	6.	522141	-	7.169.000
1066.EBA.994.002.C	1.	523111	142.775.000	145.607.000
	2.	523119	24.416.000	24.416.000
	3.	523121	151.881.000	151.890.000
1066.EBA.994.002.D	1.	521111	29.225.000	26.225.000
	2.	521115	84.084.000	84.084.000

1066.EBA.994.002.E	1.	521119	11.250.000	11.250.000
1066.EBA.994.002.F	1.	524111	49.974.000	49.974.000
1066.EBA.994.002.G	1.	524111	7.380.000	7.380.000
	2.	524113	2.700.000	2.700.000
1066.EBA.994.002.H	1.	522141	518.400.000	518.400.000
1071.EBB.951.052.A	1.	532111	10.000.000	10.000.000
1071.EBB.951.053.A	1.	532111	3.000.000	3.000.000
1071.EBB.971.051.A	1.	533121	29.500.000	29.500.000
		Total	13.434.841.000,00	13.434.841.000,00

3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum dari Aplikasi SAKTI 2023.

a. Jurnal Penyesuaian.

- Pada tanggal 31 Desember 2022 terdapat jurnal akrual yang telah dilakukan jurnal balik di bulan Januari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp. 1.295.300,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Jurnal Balik Langganan Zoom atas akun Belanja barang yang dibayar di muka senilai Rp. 218.750,-
2. Jurnal Balik Belanja Langganan Air atas akun Belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp. 930.900,-
3. Jurnal Balik Belanja Langganan Telepon atas akun Belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp. 145.650,-

4. Berdasarkan Petikan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN1/2723/KP.04.6/12/2022 tanggal 22 Desember 2022, Tentang Penunjukkan Pejabat / Pegawai Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. DJOKO PRIJONO, S.E., jabatan Sekretaris selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran;
2. HERNOWO ADI, S.H., jabatan Panitera Pengganti Diperbantukan pada Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | PEGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 42

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Font color: Auto

3. NAILY MADDA ALLIN, S.E., S.H. jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM Negara Tersertifikasi / SNT);
4. LENI SUSILOWATI, S.E. jabatan Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur selaku Bendahara Pengeluaran;
5. WACHID., jabatan Jusrita Pengganti diperbantukan pada Kepaniteraan Perkara selaku Bendahara Penerimaan / Pengelola PNB (Bendahara Negara Tersertifikasi / BNT);
6. ENDAH SUSILORINI, S.E., jabatan Jusrita Pengganti diperbantukan pada Sub Bagian Umum & Keuangan selaku Pengelola Keuangan (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai / PPABP);
7. FUAD AULIYA ROHMAN, jabatan PPNPN diperbantukan pada Sub Bagian Umum & Keuangan selaku Pengelola Keuangan;

LAMPIRAN A.1
LAPORAN PENYUSUTAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKM. PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	KOREKSI	AKM. PENYUSUTAN S.D. 30 JUNI 2023	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
INTRAKOMPTABEL									
131111	Tanah		6.551	60.866.720.873	0	0	0	0	60.866.720.873
20101	TANAH PERSIL	-	6.551	60.866.720.873	0	0	0	0	60.866.720.873
132111	Peralatan dan Mesin		839	3.403.571.737	(2.907.261.399)	(114.827.508)	0	(3.022.088.907)	381.482.830
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	7	563.939.941	(563.939.941)	0	0	(563.939.941)	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Unit	1	2.664.000	(666.000)	(666.000)	0	(1.332.000)	1.332.000
30501	ALAT KANTOR	Buah	129	299.490.708	(274.866.158)	(3.344.950)	0	(278.211.108)	21.279.600
30502	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	512	723.880.796	(682.460.121)	(5.780.075)	0	(688.240.196)	35.640.600
30601	ALAT STUDIO	Buah	18	85.397.936	(53.367.336)	(5.010.200)	0	(58.377.536)	27.020.400
30602	ALAT KOMUNIKASI	Buah	6	41.726.808	(41.726.808)	0	0	(41.726.808)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	Buah	1	3.885.000	(388.500)	(388.500)	0	(777.000)	3.108.000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	Buah	2	2.591.850	(259.185)	(259.185)	0	(518.370)	2.073.480
31001	KOMPUTER UNIT	Buah	116	1.405.939.940	(1.055.904.665)	(81.394.025)	0	(1.137.298.690)	268.641.250
31002	PERALATAN KOMPUTER	Buah	47	274.054.758	(233.682.685)	(17.984.573)	0	(251.667.258)	22.387.500
133111	Gedung dan Bangunan		12	8.614.102.755	(1.426.749.851)	(129.977.193)	0	(1.556.727.044)	7.057.375.711
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	4	7.912.516.755	(1.279.648.402)	(116.604.334)	0	(1.396.252.736)	6.516.264.019
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	7	672.954.000	(142.957.342)	(12.996.122)	0	(155.953.464)	517.000.536
40401	TUGU/TANDA BATAS	Unit	1	28.632.000	(4.144.107)	(376.737)	0	(4.520.844)	24.111.156
134113	Jaringan		3	132.750.000	(51.333.329)	(2.058.333)	0	(53.391.662)	79.358.338
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-	1	23.000.000	(7.762.500)	(287.500)	0	(8.050.000)	14.950.000

Lampiran A1 Tabel Penyusutan

Formatted: Font: (Default) Arial, Finnish

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Font color: Auto

LAMPIRAN A.1.
TABEL PENYUSUTAN

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
SEMESTER I TAHUN 2023

50401	JARINGAN AIR MINUM	-	1	95.750.000	(39.895.829)	(1.595.833)	0	(41.491.662)	54.258.338
50402	JARINGAN LISTRIK	-	1	14.000.000	(3.675.000)	(175.000)	0	(3.850.000)	10.150.000
135121	Aset Tetap Lainnya		2	190.000	0	0	0	0	190.000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	2	190.000	0	0	0	0	190.000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		19	642.246.408	(236.033.013)	(9.818.055)	0	(245.851.068)	396.395.340
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	2	52.300.000	(52.300.000)	0	0	(52.300.000)	0
30501	ALAT KANTOR	Buah	6	2.675.000	(2.675.000)	0	0	(2.675.000)	0
30601	ALAT STUDIO	Buah	1	759.000	(759.000)	0	0	(759.000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	Buah	5	72.300.408	(72.300.408)	0	0	(72.300.408)	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	5	514.212.000	(107.998.605)	(9.818.055)	0	(117.816.660)	396.395.340
JUMLAH INTRAKOMPTABEL			7.426	73.659.581.773	(4.621.377.592)	(256.681.089)	0	(4.878.058.681)	68.781.523.092
EKSTRAKOMPTABEL									
132111	Peralatan dan Mesin		139	54.658.100	(27.528.790)	(4.020.410)	0	(31.549.200)	23.108.900
30103	ALAT BANTU	Unit	1	700.000	(300.000)	(50.000)	0	(350.000)	350.000
30501	ALAT KANTOR	Buah	9	5.011.000	(2.609.500)	(492.800)	0	(3.102.300)	1.908.700
30502	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	103	44.890.100	(20.679.490)	(3.448.310)	0	(24.127.800)	20.762.300
30601	ALAT STUDIO	Buah	1	200.000	(200.000)	0	0	(200.000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	Buah	25	3.857.000	(3.739.800)	(29.300)	0	(3.769.100)	87.900
JUMLAH EKSTRAKOMPTABEL			139	54.658.100	(27.528.790)	(4.020.410)	0	(31.549.200)	23.108.900
JUMLAH INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL			7.565	73.714.239.873	(4.648.906.382)	(260.701.499)	0	(4.909.607.881)	68.804.631.992

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Background 1, Finnish

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Font color: Auto



)

Formatted: Font: (Default) Arial, Font color: Background 1, Finnish

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Font color: Auto

